

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN OBAT OLEH
UPTD FARMASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG**

Ninah Carinah¹, Ida Halimah², Cucu Jubaedah³, Maman Turyaman⁴,
Moeslihat Komara⁵

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

Ninahcharniah2@gmail.com¹; Idahalimah419@gmail.com²;
Cucujube1974@gmail.com³; mamanturyaman23@gmail.com⁴ ;
amoeskomara@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari proses pendistribusi Obat Oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang kurang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya stock obat yang berada di bagian Farmasi. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pendistribusian Obat Oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang selama ini belum mencukupi terutama untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian. Sementara respon pelaksana terhadap pelaksanaan pendistribusian obat yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana untuk merespons pekerjaan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana harus memahami maksud dan sasaran dari pelaksanaan pendistribusian obat, namun sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya secara tepat karena pelaksana menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan tugas tersebut. Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi ruang pelayanannya bersih, nyaman dan memberikan kesan yang aman. Sedangkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, TV, AC, tempat ibadah dan tempat parkir sudah ada dan memadai.

Semangat kerjasama para petugas UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang baik itu antara pimpinan serta para petugas sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadap para petugas pendistribusian obat namun tidak menutup kemungkinan rasa loyalitas kelompok kerja yang ditanamkan dan diapresiasi maupun yang diberikan kepada pada petugas pendistribusian obat akan searah dengan semangat kerja sama tersebut

Efektivitas pendistribusian obat oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dilihat dari Efisiensi, Daya Tanggap Petugas, Sarana dan Prasarana, Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok, Hubungan antara Pimpinan dan Bawahan sudah berjalan cukup efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian Obat

ABSTRACT

The background of this research was the ineffective distribution of drugs by the Pharmacy UPTD of the Subang District Health Office. This can be seen from the large stock of drugs in the Pharmacy section. The design of this research is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this study were the parties involved in the distribution of drugs by the Pharmacy UPTD of the Subang Regency Health Office.

The results of the study show that funding sourced from the Subang Regency APBD has not been sufficient, especially for basic health services, referral health services and pharmaceutical services. Pharmaceutical services. Meanwhile, the response of the implementer to the implementation of drug distribution is the awareness of the implementer, the executive's instructions to respond to the work towards acceptance or rejection, and the intensity of the response. Implementers must understand the aims and objectives of the implementation of drug distribution, but often face obstacles in implementing it properly because the implementer rejects the objectives contained in it so that they secretly divert and avoid the implementation of the task. In terms of facilities and infrastructure, the condition of the service room is clean, comfortable and gives a safe impression. Meanwhile, the availability of supporting facilities such as waiting rooms, TV, air conditioning, places of worship and parking spaces are already available and adequate.

The spirit of cooperation between the UPTD Pharmacy officers at the Subang District Health Office, both between the leadership and the officers, has been said to be good because they uphold a sense of kinship without having to create a monotonous nature towards drug distribution officers, but it does not rule out the possibility of a sense of working group loyalty being instilled and appreciated as well as those who given to drug distribution officers will be in line with the spirit of cooperation

The effectiveness of drug distribution by the Pharmacy UPTD of the Subang District Health Office is seen from the efficiency, responsiveness of officers, facilities and infrastructure, the spirit of cooperation and group loyalty, and the relationship between leaders and subordinates has been running quite effectively.

Keywords: Effectiveness, Drug Distribution

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manajemen logistik obat merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan obat yang dikelola secara optimal demi tercapainya ketepatan jumlah dan jenis obat dan perbekalan kesehatan. Pengelolaan obat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan.

Proses perencanaan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan diawali dari data yang disampaikan Puskesmas ke Unit Pengelola Obat/Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikompilasi menjadi rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan teknik-teknik perhitungannya (Kepmenkes RI Nomor 1.412/Menkes/SK/XI/2002).

Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Obat dan Perbekes merupakan salah satu sub system yang dibahas tersendiri dalam system kesehatan nasional (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional), dimana pengelolaannya

diselenggarakan secara bersama dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, kegiatan dalam system kesehatan nasional tersebut, adalah untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu obat, ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat (terutama obat esensial) oleh masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana sediaan farmasi (obat) dan alat kesehatan/perbekalan kesehatan merupakan urusan wajib dari pemerintah, dimana penyediaannya sampai pengawasan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauannya termasuk urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang membawahi wilayah kerja sebanyak 40 Puskesmas, 74 Puskemas Pembantu, 117 Polindes, 10 Poskesdes, 24 PONEB yang tersebar di 30 Kecamatan. Aksebilitas pelayanan kesehatan dasar menjadi prioritas program bidang kesehatan, sesuai dengan visi misi dari Dinas Kesehatan yang salah satu misinya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan kesehatan selain bertumpu pada kemampuan sumber daya kesehatannya baik sarana prasarana dan infrastrukturnya, salah satu komponen yang sangat menunjang dari pelayanan kesehatan adalah obat. Kekurangan akan ketersediaan obat dapat memberikan dampak signifikan pada pelayanan kesehatan bahkan pada kepercayaan diri dari petugas puskesmas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi sebagai unit pelaksana kegiatan dari Dinas Kesehatan, sebagai Instalasi Farmasi Kabupaten yang dapat

membantu secara operasional pengelolaan manajemen obat secara komprehensif, dengan tugas pokoknya; merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan, sehingga sebagian fungsi urusan wajib kesehatan dalam bidang sediaan farmasi dapat berjalan optimal, terkendali dan terintegrasi. UPTD Farmasi sebagai unit pelaksana harus mampu menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan di unit pelayanan.

Tahap distribusi merupakan salah satu tahap yang terdapat pada siklus manajemen obat yang memiliki peranan penting dan kompleks, bahkan mulai dari proses penyimpanan sampai dengan distribusi dapat menghabiskan komponen biaya yang cukup signifikan dalam anggaran kesehatan karena pengaruh dari beberapa faktor yang ada. Oleh karena itu, sistem distribusi harus dipilih sesuai dengan kondisi yang ada sehingga pelayanan obat dapat dilaksanakan secara maksimal dan hasil yang didapatkan juga maksimal.

Tabel 1.1
Mutasi Obat Berbagai Anggran Di
UPTD Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Subang

| No | Tahun Anggaran | Stok Awal | Penerimaan |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2018 | 12,038,131,091 | 15,479,439,198 |
| 2 | 2019 | 11,977,655,973 | 17,099,242,124 |
| 3 | 2020 | 8,407,822,971 | 51,894,964,270 |

Lanjutan

| Tahun | Total Persediaan | Disatribusi | Sisa Stok |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 2018 | 27,517,570,289 | 15,539,914,316 | 11,977,655,973 |
| 2019 | 29,076,898,097 | 20,669,075,126 | 8,407,822,971 |
| 2020 | 60,302,787,241 | 48,358,137,924 | 11,944,649,317 |

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa distribusi obat oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas, tetapi tidak semua dapat tersalurkan, itu banyak disebabkan oleh rentang waktu pengajuan permintaan dari Puskesmas yang sudah di jadwalkan dari tanggal 25 sampai tanggal 5 setiap bulannya itu tidak terpenuhi, karena banyak Puskesmas yang mengirimkan permintaan pada waktu pagi pada jadwal pengiriman, sehingga oleh petugas tidak terlayanan diakibatkan di UPTD Farmasi ada 3 gudang tetapi jumlah sumber daya manusianya masih kurang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Obat oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang?

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas merupakan tingkat *output* (hasil) yang dapat dicapai dengan menggunakan sarana, prasarana dan sumber daya lain secara maksimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hirawan, 2014)

Menurut Martani dan Lubis (2007:55) Pendekatan Pengukuran Efektivitas dapat diukur dengan indikator:

1. Efisiensi
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya dan waktu untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
2. Daya Tanggap Petugas
Keinginan untuk melayani masyarakat secara tepat dengan tidak mengulur-ulur waktu. Saat pengguna layanan membutuhkan pelayanan, maka penyedia layanan segera memberikan pelayanan tanpa harus menunggu lama.
3. Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
4. Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok
Setiap organisasi selalu berusaha agar produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan. Untuk itu pimpinan perlu mencari cara dan solusi guna menimbulkan semangat kerja para karyawan. Hal itu penting, sebab semangat kerja mencerminkan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan lebih cepat dapat diselesaikan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai.
5. Hubungan antara Pimpinan dan Bawahan
Hubungan antara pimpinan dan pegawai berpengaruh untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan lancar.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar

akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2007:55) bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Kemudian, berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengukuran efektivitas, penulis akan menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Martani dan Lubis diantaranya ialah : Efisiensi (waktu dan biaya); Prosedur pelayanan; Koordinasi antara atasan dan bawahan; Responsivitas pegawai, dan Sarana prasarana.

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (*key informant*). Orientasi mengenai informan adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2010: 399).

HASIL PENELITIAN

4.1 Efisiensi

Tahap distribusi merupakan salah satu tahap yang terdapat pada siklus manajemen obat yang memiliki peranan penting dan kompleks, bahkan mulai dari proses penyimpanan sampai dengan distribusi dapat menghabiskan komponen biaya yang cukup signifikan dalam anggaran kesehatan karena pengaruh dari beberapa faktor yang ada. Oleh karena itu, sistem distribusi harus dipilih sesuai dengan kondisi yang ada sehingga pelayanan obat dapat

dilaksanakan secara maksimal dan hasil yang didapatkan juga maksimal.

Sistem distribusi memegang peranan penting dalam penyaluran ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan unit-unit di setiap bagian farmasi di Puskesmas-Puskesmas. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah upaya dalam menjamin pemberian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang benar dan tepat kepada pasien, sesuai dengan yang tertulis pada resep atau kartu obat dan dilengkapi dengan informasi sesuai yang dibutuhkan pasien.

Sumber pembiayaan untuk pendistribusian obat pada UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang adalah dari APBD Kabupaten Subang. Oleh karena itu pada proses penyiapan dana yang dibutuhkan dalam pendistribusian obat di UPTD Farmasi dituangkan dalam usulan anggaran UPTD Farmasi melalui APBD Kabupaten Subang. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang selama ini belum mencukupi terutama untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian, meliputi kegiatan: Penyediaan obat terutama obat generik dan perbekalan kesehatan;Pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi di kabupaten; Pembangunan baru instalasi farmasi dan penyediaan sarana pendukungnya; dan Distribusi Obat dan BMHP, sistem elogistic.

Pendistribusian obat di Kabupaten Subang merupakan kewenangan dari UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagai pelaksana pengadaan obat, namun dalam proses perencanaannya UPTD Farmasi melibatkan semua pihak terutama Dokter dan Kepala Puskesmas. Setiap

awal tahun diadakan pertemuan membahas perencanaan obat. Tahap awal perencanaan obat di mulai dari pemilihan obat dimana setiap obat yang diusulkan dari puskesmas harus benar-benar sesuai pola penyakit dan jumlah penduduk setempat, dan harus berdasarkan DOEN dan Fornas, walaupun masih ada beberapa jenis yang tidak ada pada daftar DOEN. Selanjutnya tahap kompilasi dimana harus berdasarkan rata-rata pemakaian obat di puskesmas dalam setahun, tahap berikutnya yaitu kami menghitung berapa obat yang harus disediakan dengan menggunakan pola konsumsi.

Selama ini UPTD Farmasi telah berupaya menjalankan tahapan perencanaan obat dengan sebaik-baiknya dikarenakan ketersediaan obat di puskesmas menjadi prioritas Dinas Kesehatan melalui UPTD Farmasi untuk menjawab keluhan masyarakat selama ini. Namun tidak semua berjalan dengan baik, salah satu faktor penyebabnya Puskesmas belum melaksanakan perencanaan yang baik, ketepatan dan kebenaran data LPLPO Puskesmas belum menunjukkan kebutuhan optimum, selain itu tanggungjawab Kepala Puskesmas yang cukup banyak seringkali menyebabkan perencanaan obat di Puskesmas terbengkalai

UPTD Farmasi mendistribusikan obat melalui pengisian formulir untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pendistribusian dan pemberian. Ketika suatu obat dikeluarkan dari UPTD Farmasi atau disiapkan dan disalurkan dalam bentuk atau wadah (*container*) yang berbeda dan tidak segera diberikan maka obat harus diberi label dengan nama obat, dosis atau konsentrasi obat, tanggal penyiapan, dan tanggal kadaluwarsa. UPTD Farmasi sangat sentral dan titik distribusi obat yang lain di seluruh

Puskemas yang ada di Kabupaten Subang menggunakan sistem yang sama. Sistem menunjang pengeluaran obat secara akurat dan tepat waktu.

4.2 Daya Tanggap Petugas

Daya tanggap petugas di maksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena Daya tanggap petugas secara langsung menggambarkan kemampuan UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi pendistribusian obat bagi Puskesmas. Daya tanggap petugas dapat dikatakan rendah apabila dalam pemberian pelayanan tidak selaras dengan kebutuhan obat untuk masyarakat di Puskesmas, maka dengan sendirinya masyarakat akan menilai bahwa kinerja dari UPTD Farmasi tersebut buruk.

Prestasi yang dimiliki sangat penting karena diharapkan keseluruhan aparatur UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memiliki daya tangkap yang cepat dan sigap dalam masing-masing diri aparatur itu sendiri. Dalam diri aparatur sebenarnya banyak potensi yang belum dikembangkan. Karena ketika di lapangan menghadapi masyarakat perlu adanya sikap yang baik dan sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Tanpa digerakkan lebih banyak tetapi tidak ada hasil dibandingkan kelihatan saja melakukan proses pelayanan sedikit, namun pelaksanaannya bisa menjadi lebih baik. Keinginan masyarakat tidak banyak dan tidak semata-mata untuk pribadi mereka saja, namun masih banyak masyarakat lain mempunyai keinginan tentang peningkatan pelayanan yang efektif dan efisiensi. Namun keinginan masyarakat ini sering kali di salah artikan aparatur, karena terkadang masyarakat malah menjalankan suatu tugas seakan-akan menuntut aparatur untuk harus secepatnya pelayanan dilaksanakan,

akan tetapi aparaturnya sangat mengerti kondisi seperti ini karena aparaturnya masih membawa fungsi dan tugas yang sebenarnya.

Respon pelaksana terhadap pelaksanaan pendistribusian obat yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana untuk merespons pekerjaan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana harus memahami maksud dan sasaran dari pelaksanaan pendistribusian obat, namun sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya secara tepat karena pelaksana menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan tugas tersebut. Untuk mencapai sasaran program yang telah dibuat, maka dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang selaku pembuat kebijakan selalu memberikan dukungan kepada perangkat kerjanya dalam melaksanakan SOP pendistribusian obat yang dibuat. Wujud dari dukungan tersebut seperti menempatkan kebijakan menjadi prioritas, menempatkan para pegawai yang merupakan pelaksana kebijakan dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan struktur dinas dilihat dari faktor agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pegawai yang berperan sebagai pelaksana program agar mereka mendukung program yang ada dan bekerja secara total dan menyeluruh dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Sikap dalam menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi dari petugas Puskesmas yang dilayani menjadi tolak ukur dalam UPTD Farmasi Dinas Kesehatan apakah kegiatan pelayanan yang diberikan

kepada Puskesmas dalam pendistribusian obat baik atau tidak. Petugas yang tanggap sangat diharapkan agar keluhan dan kebutuhan obat Puskesmas dapat terpenuhi dengan baik. Keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan pendistribusian obat kepada setiap Puskesmas sangat dibutuhkan.

4.3 Sarana dan Prasarana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan

Proses pendistribusian obat pada UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah obat yang diminta ke UPTD Farmasi dengan jumlah obat yang diterima oleh Puskesmas. Hal ini dikarenakan di gudang penyimpanan obat UPTD Farmasi sering terjadi kekosongan stok obat sehingga menyebabkan, Puskesmas kekurangan obat dan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Empat masalah pada proses rantai pasokan produk farmasi meliputi ketersediaan stok produk farmasi di UPTD Farmasi, kemampuan pasokan produk farmasi dari Gudang UPTD Farmasi, akurasi perencanaan produk farmasi dari Puskesmas, dan defisit produk farmasi di Puskesmas

Pengadaan obat dilakukan setelah tim perencanaan obat terpadu Dinas Kesehatan melalui UPTD Farmasi melakukan penghitungan biaya

kebutuhan obat dalam rupiah yang disesuaikan dengan dana yang tersedia. Salah satu hal yang penting dalam pengadaan obat adalah kesesuaian jumlah dan jenis obat antara yang direncanakan dan yang diadakan, untuk mencegah kekurangan atau kelebihan obat. Hal itu menunjukkan bahwa biaya kebutuhan obat di Kabupaten Subang cukup tinggi, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan dari Puskesmas

UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang setiap tahun memang telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi tersebut termasuk program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai, hal ini dalam upaya peningkatan mutu pelayanan menuju pada pencapaian tingkat efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi bagi pegawai yang ada pada UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Keberhasilan sebuah sistem dapat tercapai dengan adanya kerjasama tim yang baik dalam sebuah organisasi. Sebuah sistem diterapkan haruslah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sistem tersebut diterapkan. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan sosial-kultur yang ada dalam situasi yang terjadi sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan keadaan, dan dapat diterima dalam masyarakat. UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dapat dikatakan baik karena memiliki standar fasilitas yang nyaman. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ruang kerja dan ketersediaan fasilitas pendukung di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah baik dan lengkap. Kondisi ruang pelayanannya bersih, nyaman dan

memberikan kesan yang aman. Sedangkan ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, TV, AC, tempat ibadah dan tempat parkir sudah ada dan memadai.

4.4 Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok

Kemauan atau semangat kerja dari setiap kelompok orang-orang secara bersama-sama untuk menyumbangkan tenaga atau pikirannya mencapai tujuan bersama harus diterapkan oleh setiap petugas di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengukur efektivitas. Semakin baik kerjasama yang terjalin dan semakin tinggi loyalitas kelompok kerja pegawai maka semakin efektif pula pelayanan yang diberikan oleh UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Semangat kerjasama para petugas UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang baik itu antara pimpinan serta para petugas sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadap para petugas pendistribusian obat namun tidak menutup kemungkinan rasa loyalitas kelompok kerja yang ditanamkan dan diapresiasi maupun yang diberikan kepada para petugas pendistribusian obat akan searah dengan semangat kerja sama tersebut. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengukur efektivitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membina semangat dan loyalitas kelompok kerja yaitu koordinasi atasan dan para pegawai serta koordinasi antar sesama pegawai.

Petugas UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah

memiliki semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja yang baik. Hal itu dapat dibuktikan bahwa pekerjaan petugas telah sesuai dengan standar operasional pelayanan dimana dalam pelaksanaan pendistribusian obat ke setiap Puskesmas, petugas selalu berkoordinasi di setiap bidang, jadi kerjasama antar bidang dan antar seksi petugas berjalan dengan baik. Ditambah di setiap bidang mempunyai chat *whatsapp group* yang dapat mengkonfirmasi permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan dapat langsung dikoordinasikan secara langsung. Diharapkan fasilitas seperti chat *whatsapp group* ini dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang hendak dihadapi oleh petugas di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Upaya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat sangat diperlukan untuk itu kerjasama yang terjalin antar pegawai sangat baik sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam melayani masyarakat. Kerjasama yang baik, sifat saling terbuka antara pimpinan dan bawahan meningkatkan loyalitas kelompok kerja. Selain itu, penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki untuk mempermudah menyelesaikan tugas-tugas yang mereka tangani. Pegawai juga cukup disiplin dalam melayani masyarakat sehingga dapat meningkatkan loyalitas kelompok kerja. Hal ini dapat membuktikan pelayanan pendistribusian obat di UPTD Farmasi efektif.

4.5 Hubungan antara Pimpinan dan Bawahan

Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat maupun sesama pegawai serta hubungan komunikasi

yang harmonis antara pimpinan organisasi dan bawahan dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sikap jujur, terbuka, member dan menerima masukan dengan baik, mengapresiasi kinerja pegawai melalui reward serta memberikan *feedback* yang baik akan membangun komunikasi yang baik sehingga mempermudah dalam pelaksanaan pendistribusian obat.

Petugas UPTD Farmasi dijadikan mitra kerja oleh pimpinan dan mengedepankan kerjasama tim untuk melancarkan pelayanan pendistribusian obat kepada setiap Puskesmas itu terlihat atasan percaya kesuksesan bawahan akan memfasilitasi kesuksesan mereka juga, ketika bawahan bergerak ke arah pencapaian tujuan, maka mereka juga akan bergerak mencapai tujuan bersama. Terjalannya kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dapat menghasilkan suatu produktivitas kinerja bersama, dimana ketika bawahan mampu mencapai target pekerjaan mereka maka atasan pun dapat mencapai tujuan dari perogram kerja tersebut.

Hubungan pimpinan dan bawahan pada UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sudah dapat dikatakan baik dan harmonis. Dukungan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dan juga terhadap sesama bawahan pun nampak baik. Semangat kerjasama antara pimpinan dan bawahan dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadap para pegawainya namun tidak menutup kemungkinan rasa loyalitas kelompok kerja yang ditanamkan akan searah dengan semangat kerjasama tersebut. Adanya

kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi membuat terciptanya hubungan saling ketergantungan antara atasan dan bawahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pendistribusian obat secara umum berjalan dengan baik dalam melaksanakan pendistribusian obat kepada setiap Puskesmas di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Anggaran Tahun 2021 yang sekarang ada di UPTD Farmasi sebenarnya kurang ideal bila dibanding dengan kebutuhan dan beban kerja yang harus dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan rencana awal, hal ini terjadi karena adanya beberapa kali refocusing anggaran terkait dengan adanya pandemi covid19.

UPTD Farmasi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pendistribusian obat sudah menyusun SOP sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Terkait badan pelaksana dari suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur di dalam organisasi

Secara umum sarana dan prasarana yang ada sekarang berjalan cukup baik, walaupun sebenarnya beberapa kelengkapan sarana dan prasarana tersebut harus sudah diremajakan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin berubah

Kerjasama antara petugas UPTD Farmasi dengan pimpinan sudah berjalan dengan baik, sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan pendistribusian obat. Karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kerjasama merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan, yakni memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan

tuntutan masyarakat. Hubungan atasan dan bawahan sudah terjalin dengan baik, itu terlihat dengan adanya pertemuan setiap minggu, dan diadakan pembinaan kepada petugas UPTD Farmasi mengenai program kerja dan pelatihan-pelatihan pada setiap bulannya, sehingga terjalin dengan baik keakraban antara pimpinan dan bawahan, karena selalu ada komunikasi aktif yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada setiap pertemuan.

5.2 Saran

Perlu evaluasi kerja terhadap setiap petugas secara rutin dan pemberian penghargaan kepada petugas yang bekerja dengan baik, sehingga membuat petugas termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Selain itu, adanya perawatan secara rutin agar sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas dan masyarakat selalu baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Drucker, Peter, F. 2002. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*. Jakarta: Gramedia
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta: PT BPF.
- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan
- Martani dan Lubis. 2007. *Teori Organisasi : Perspektif Makro*. Pusat Antar Universitas - Universitas Indonesia
- Miles dan Huberman 1994. *Qualitative Data Analysis*. diterjemahkan Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya,

Muhyadi, 2009. *Organisasi, Teori, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Depdikbud.

Widodo, Hendra. 2013. *Ilmu Meracik Obat untuk Apoteker*. Jogjakarta: D-Medika.

Dokumen-Dokumen

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1412/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)

Depkes RI. 1990. Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan obat. Jakarta: Depkes RI

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Depkes RI. 2003, Instrumen Stratifikasi Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Hirawan, Z. (2014). Efektivitas Musrenbang dalam Penyusunan APBD Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA*, 5(2).